

TC MEDIA

I N S P I R A S I B E R S I N E R G I



HALAMAN BARU



Halaman Baru

Sekretariat Pengadilan Pajak

Jl. Hayam Wuruk No.7 Jakarta Pusat

Laman

setpp.kemenkeu.go.id

Surel

kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

Instagram

[setpp.kemenkeu](https://www.instagram.com/setpp.kemenkeu)

[tcmedia_pp](https://www.instagram.com/tcmedia_pp)

DAFTAR ISI

TC MEDIA Edisi 131 TAHUN 2024

Editorial	4
Sudah Berinovasi?	
Infografis	5
Saluran Pengaduan	
Foto Kita	6
Lintas Peristiwa	8
Fokus	
Nahkoda Baru	12
Yang Tercapai di 2023	16
Harapan 2024	20
Lokus	
Pelatihan Kehumasan Setjen	22
Cerita Program Secondment 2023	25
Hari Oeang 77	28
Tugas Belajar	30
Kemenkeu Mengajar 8	33
Tentang Pajak	
Memahami Prosedur Pencegahan, Penyanderaan, dan Penagihan pajak	36
Rona	
Apa Kabar Kesehatan Mental Pekerja di 2023?	38
IT	
IKH Online	40
Komik	
SiTaco #12: Resolusi Baru	41



Tim Penyusunan TC Media Tahun
2024 berdasarkan Keputusan
Sekretaris Pengadilan Pajak Nomor
KEP-14/SP/2024 tanggal 28 Februari
2024

Pengarah I: Sekretaris Pengadilan
Pajak

Pengarah II: Wakil Sekretaris
Pengadilan Pajak

Penanggung Jawab: Kepala Bagian
Teknologi Informasi dan Komunikasi

Redaktur Umum: Kepala Subbagian
Informasi dan Publikasi

Redaktur Pelaksana: Gilang Pratama

Penyunting: Rizki Damayanti,
M. Hafizullah Lubis

Desain Grafis dan Fotografer: Faishal
Chairu Noor, Ridwan Firmansyah,
Ariyan Bayu Wijaya

Tim Redaksi: Gabriella Grace,
Heru Nugroho, Mega Nurmalsari,
Sukindar Ari Santoso
Astris Dyah Perwita, Mutia Rizki,
Felixita Novelia Christiana Dewi,
Rahma Noor Fadhila, Risya Ayu,
Audrey Ruth Selena, Rehana Harahap

SALURAN PENGADUAN



pengaduan.setpp@kemenkeu.go.id



0813-1905-0007



wise.kemenkeu.go.id

siwas.mahkamahagung.go.id



Gedung A Pengadilan Pajak
Jalan Hayam Wuruk No 7
Jakarta Pusat



memulai kembali



Tahun baru adalah kesempatan untuk memulai kembali, mengubah impian menjadi kenyataan, dan menciptakan dunia yang lebih baik bagi kita semua. Ini adalah waktu untuk belajar dari kesalahan kita, menghargai keberhasilan kita, dan mengubah kegagalan menjadi peluang untuk pertumbuhan pribadi dan kolektif. Di tengah-tengah semangat menyambut tahun baru, kita juga harus mengakui bahwa kita telah melewati tahun yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Tahun sebelumnya telah memberikan ujian yang tak terduga bagi kita semua, berbagai isu mempengaruhi kehidupan sehari-hari hingga keadaan sosial. Namun, di tengah-tengah semua ini, kita juga telah melihat ketahanan dan kekuatan manusia yang luar biasa.

TC Media Edisi 131 ini menyajikan berbagai momen yang dihabiskan selama tahun 2023. Tentunya hal tersebut tidak terlepas dari banyak cerita dan kenangan yang telah dilewati dengan segudang harapan yang akan diraih ke depan. Dalam edisi ini, TC Media juga menyuguhkan halaman Nakhoda Baru sebagai wadah untuk mengenal lebih dekat kepribadian dan program kerja dari pemimpin baru Sekretariat Pengadilan Pajak. Selain itu, TC Media juga berusaha menampilkan cerita dan kenangan tersebut dari perspektif-perspektif sekitar yang mungkin banyak belum diketahui. Dengan demikian, dengan terbitnya edisi ini, tahapan rencana yang dibuat ke depannya dapat dibuat lebih solid dengan melihat masa lalu sebagai pembelajaran yang berharga.





Semangat Kartini Semangat Transformasi
Foto
Faishal Chairu



E-Tax Court Day

Jakarta, 30 November 2023. Set. PP menyelenggarakan sosialisasi e-Tax Court pada hari Kamis, 30 November 2023, bertempat di Aula Gedung A.A. Maramis Kemenkeu. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman dan pengenalan secara lebih intensif kepada pemangku kepentingan mengenai penggunaan dan kelebihan pengajuan banding/gugatan menggunakan e-Tax Court. Kegiatan dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, penyampaian *keynote speech* oleh Sekjen dan arahan dari Waka II Pengadilan Pajak. Selanjutnya, kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan paparan *Product Knowledge* oleh Ses. PP, *talkshow* tentang e-Tax Court, serta diakhiri dengan sesi diskusi oleh para peserta.

Teks Kasya Foto Faishal



Rapat Kerja Pengadilan Pajak

Jakarta, 1 Desember 2023. Pengadilan Pajak menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) Tahunan pada hari Jumat, 1 Desember 2023, bertempat di Aula Gedung BPKP Perwakilan Provinsi Banten. Rapat ini mengangkat tema "**Pengadilan Pajak yang Independen dalam Perspektif Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2023**". Raker dibuka dengan sambutan dari Ketua Pengadilan Pajak dan dilanjutkan seminar dengan narasumber Astriyani, S.H., M.P.M., Koord. Tim Asistensi Pembaruan Peradilan MA, dan Dr. Dian Rositawati, S.H., M.A., Anggota Tim Asistensi Pembaruan Peradilan MA. Raker ditutup dengan dialog dan diskusi mengenai beberapa isu dan permasalahan yang terjadi di Pengadilan Pajak, serta bagaimana solusinya untuk Pengadilan Pajak ke depan.

Teks Kasya Foto Faishal



Membangun Integritas Sekretariat Jenderal

Jakarta, 4 Desember 2023. Dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, Sekretariat Jenderal melaksanakan kegiatan Seminar dengan tema membangun keluarga berintegritas. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 4 Desember 2023, pukul 08.30-11.30 WIB, bertempat di Aula Mezzanine. Kegiatan ini dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan penyampaian *keynote speech* oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI. Selanjutnya, kegiatan ini dilaksanakan dengan seminar dan *talkshow* dengan tema membangun keluarga berintegritas, serta diakhiri dengan sesi diskusi oleh para peserta.

Teks Kasya Foto Faishal

Town Hall Meeting SetPP 2023

Jakarta, 21 Desember 2023. Set. PP menyelenggarakan kegiatan **Town Hall Meeting SetPP 2023** yang bertempat di Aula Gedung BPKP Banten. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut tahun 2024 dengan penuh kegembiraan serta harapan. Kegiatan dibuka dengan sarapan bersama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan dilanjutkan penyampaian *keynote speech* oleh Ses. PP. Selanjutnya, dilaksanakan seminar motivasi mengenai pentingnya kesiapan psikologis pada era transformasi, *sharing session* mengenai membangun *growth mindset* sebagai seorang PNS, dan *town hall meeting* mengenai *celebrating success, embracing tomorrow* oleh Sekretaris dan Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak, serta diakhiri dengan sesi diskusi oleh para peserta.

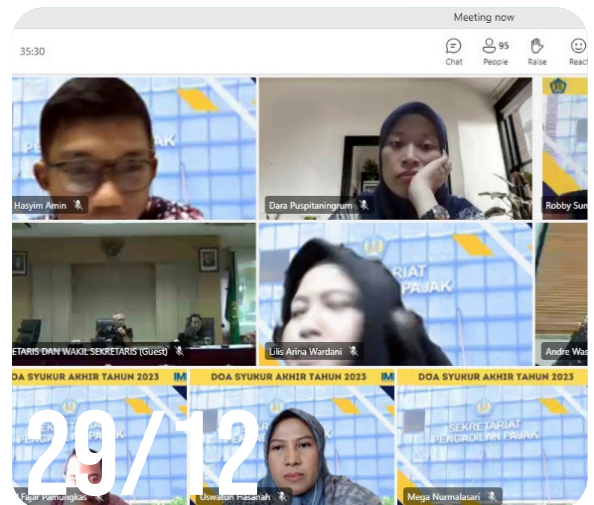
Teks Kasya Foto Faishal



Doa Syukur Akhir Tahun 2023

Jakarta, 29 Desember 2023. Sekretariat Pengadilan Pajak menyelenggarakan kegiatan Doa Syukur Akhir Tahun 2023 pada hari Jumat, 29 Desember 2023 yang dilaksanakan secara *hybrid*. Kegiatan dihadiri oleh seluruh pejabat eselon III secara *onsite* di lantai VI Gedung F Pengadilan Pajak dan oleh para pegawai secara daring melalui aplikasi Ms. Teams. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan menyampaikan rasa syukur segenap pegawai kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah yang diberikan kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan dalam melaksanakan tugas dan memohon petunjuk, kemudahan, dan kelancaran untuk pelaksanaan tugas pada tahun 2024. Kegiatan ini dipimpin oleh Sekretaris dan Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak.

Teks Kasya Foto Faishal



Berita Duka Pegawai Set. PP

Jakarta, 17 Januari 2024. Salah satu pegawai Set. PP, Cangga Yudha Jaya, telah berulang ke Rahmatullah pada hari Rabu, 17 Januari 2024, pukul 13.45 WIB, karena sakit. Para pegawai SetPP ikut menghadiri pemakaman almarhum pada hari Kamis 18 Januari 2024, pukul 11.00 di Pemakaman Layur Rawamangun. Seluruh Pimpinan dan Staf Sekretariat Pengadilan Pajak mengucapkan turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya dan semoga Almarhum diberi tempat yang layak di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkannya diberi kekuatan Iman dan ketabahan oleh Allah SWT. Aamiin.

Teks Kasya Foto Faishal





Kick Off harlah

Jakarta, 26 Januari 2024. Dalam rangka Hari Lahir Pengadilan Pajak ke-22, untuk memeriahkan pembukaan rangkaian kegiatan Hari Lahir Pengadilan Pajak, diadakan senam pagi, sarapan bersama, dan ekshibisi olahraga. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat, 26 Januari 2024. Senam pagi disambut dengan antusias oleh para pegawai dan Hakim Pengadilan Pajak. Dengan ini, rangkaian kegiatan Harlah PP pun, dimulai.

Teks Mutia Foto Faishal



Pelantikan Sekretaris dan Sekretaris Pengganti

Jakarta, 23 Februari 2024. Bertempat di Aula Gedung BPKP Lantai 4, dilaksanakan Upacara Pengambilan Sumpah Sekretaris dan Sekretaris Pengganti serta Pengucapan Sumpah Panitera dan Panitera Pengganti Pengadilan Pajak. Acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Pengadilan Pajak, Hakim Pengadilan Pajak, serta Pejabat Eselon III Sekretariat Pengadilan Pajak. Pejabat yang dilantik yaitu Bapak Budi Setyawan M.N.Y. yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak menjadi Sekretaris/Panitera Pengadilan Pajak. Pada kesempatan ini, dilaksanakan juga pelantikan Moh. Gauss Sitompul, Anang Bagus Giarto, dan Aditya Kusuma Rachman selaku Sekretaris Pengganti/Panitera Pengganti Pengadilan Pajak.

Teks Mutia Foto Faishal



Seminar dengan DJP

Jakarta, 23 Februari 2024. Dalam rangka memahami perkembangan terbaru di bidang perpajakan internasional, telah dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Direktorat Perpajakan Internasional DJP. Kegiatan yang dilaksanakan di Lantai 6 Gedung F Pengadilan Pajak ini mendulang antusiasme yang cukup tinggi dari para Hakim Pengadilan Pajak. Bertemakan 'Perkembangan Terbaru Regulasi dan Panduan *Transfer Pricing*, MAP, APA, dan EoI', kegiatan ini dihadiri oleh Hakim Pengadilan Pajak dan Direktur Perpajakan Internasional DJP, Mekar Satria Utama beserta jajaran. Kegiatan yang dipandu oleh Aji Witono selaku moderator ini diharapkan dapat menjadi kegiatan yang bermanfaat bagi hakim Pengadilan Pajak.

Teks Mutia Foto Faishal

Seminar dengan Mahkamah Agung

Jakarta, 5 Maret 2024. Pengadilan Pajak telah mengadakan kegiatan yang dikemas dalam bentuk Seminar Perpajakan Internasional di Aula Gedung BPKP Lantai 4. Kegiatan ini membahas masalah penerapan dan interpretasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dengan Ahmad Komara dan Aji Witono selaku moderator. Seminar dibuka oleh Ketua Pengadilan Pajak yang menyampaikan perihal kondisi ekonomi global dan kaitannya dengan perpajakan internasional. Hal yang tak kalah penting yaitu *keynote speech* yang disampaikan oleh Hakim Agung Cerah Bangun, di mana beliau menyampaikan pentingnya peran dan tanggung jawab sebagai Hakim Pajak.

Teks Mutia Foto Faishal



Sosialisasi IKH Online

Jakarta, 6 Maret 2024. Terbitnya Peraturan Ketua Pengadilan Pajak nomor PER-01/PP/2024 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak yang mulai berlaku pada tanggal 12 April 2024 akan memudahkan proses permohonan IKH, karena dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja, dengan sistem IKH Online. Untuk itu, diadakan Sosialisasi IKH Online yang dilakukan secara daring melalui Zoom dan Youtube. Narasumber kegiatan ini adalah Plt. Kepala Subbagian Informasi dan Publikasi, Akmal Yuniar Suprobo, dan Kepala Subbagian PPTIK, Sasvia Julia. Peserta merupakan umum dan kuasa hukum Pengadilan Pajak. IKH Online, **#NyataMudahnya!**

Teks Mutia Foto Faishal



Kegiatan Ramadan

Jakarta, 11 Maret 2024. Memasuki bulan Ramadan, Pengadilan Pajak turut serta memeriahkan bulan suci ini dengan berbagai kegiatan, yang dipunggawai oleh Kerohanian Islam Pengadilan Pajak. Mulai dari kegiatan Bakti Sosial, Iktikaf Masjid Al Amin, hingga berbagai lomba menarik seperti Ranking 1, Lomba *Reels*, dan Lomba Dai Cilik. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan dan menambah semangat Ramadan pada para pegawai di Pengadilan Pajak, khususnya bagi pegawai muslim dan muslimah yang menjalankan ibadah Ramadan.

Teks Mutia Foto Faishal



Nahkoda Baru

Sekretaris Pengadilan Pajak Baru

Usai dilantik sebagai Sekretaris Pengadilan Pajak oleh Menteri Keuangan pada tanggal 16 Februari 2024 lalu, Budi Setyawan M.N.Y. kemudian mengikuti upacara pengambilan sumpah sebagai Panitera yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Februari 2024 di aula BPKP Perwakilan Provinsi Banten, Jakarta Pusat. Mengemban jabatan baru, pria yang kerap disapa Pak Budi atau Pak Ses ini langsung bergerak cepat melanjutkan estafet kepemimpinan di Set. PP yang sebelumnya dikepalai Dendi Agung Wibowo.

Pada tanggal 4 April 2024, tim TCMedia berkesempatan mengunjungi Pak Ses di ruangnya untuk berbincang seputar keseharian dan juga rencana kerja dari sekretaris yang baru. Mari kita simak wawancara TCMedia bersama Pak Ses berikut ini.

Kita mulai dari topik yang ringan dulu ya, Pak, bagaimana rutinitas yang Bapak jalani pada hari kerja?

Biasanya saya naik kereta untuk menuju kantor dan turun di Stasiun Sawah Besar atau Stasiun Juanda. Apabila tidak sedang mengejar waktu, biasanya saya lebih memilih untuk jalan kaki kurang lebih selama lima belas menit. Kalo ditanya kenapa memilih jalan kaki, karena sekalian diniatkan untuk berolahraga dan agar lebih sering bergerak.

Kemudian setelah sampai kantor dan menyelesaikan rutinitas di pagi hari, saya memeriksa agenda di kalender Teams, nadine, grup *task force*, dan grup prioritas lainnya untuk memastikan kesiapan bahan dan tindak lanjutnya jika diperlukan. Setelah itu, kalo di nadine saya prioritaskan yang “sangat segera” dan “segera”, baru kemudian yang lainnya. Trus kalo di TC One dan meja saya ada berkas yang harus ditandatangani, biasanya saya selesaikan dulu.

Selanjutnya agar update saya juga mengecek beberapa dashboard seperti misalnya *dashboard* di TC One terkait penanganan sengketa dan *dashboard* lainnya di *tableu* terkait implementasi e Tax Court, termasuk melihat trend pengajuan dan penyelesaiannya. Dengan begitu sekilas bisa tahu apa yang sedang terjadi dan permasalahan yang ada, sehingga bisa segera dicari solusi terbaiknya seperti apa.

Saya juga mengkoordinasikan dan mengevaluasi target organisasi, mitigasi risiko, dams dan tindaklanjutnya secara rutin baik yang sifatnya bulanan maupun triwulanan.

Pada akhir pekan, biasanya bagaimana rutinitas Bapak?

Saya lebih sering berada di rumah. Biasanya agenda rutin saya pada hari libur adalah olah raga seperti bulu tangkis dan pingpong, kecuali ada agenda keluarga. Sesekali saya juga menyempatkan waktu untuk berkunjung ke rumah anak/cucu, berlibur

bersama keluarga di luar kota atau sekedar makan bersama di sekitar rumah.

Dengan jabatan Bapak yang baru sebagai Sekretaris Pengadilan Pajak, apakah terdapat perbedaan dari sisi pekerjaan, keseharian maupun kebiasaan Bapak?

Tentu saja ada dan yang paling jelas adalah dari segi tanggung jawab pekerjaan. Meskipun tugas Wases membantu Ses, namun terdapat beberapa tugas yang hanya dimiliki oleh Ses. Contohnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, menjadi atasan langsung bagi 45 orang pejabat administrator dimana sebelumnya Wases tidak memiliki bawahan langsung, dan juga dulu sebagai Wases, yang menilai saya hanya peer dan atasan langsung. Sebagai Ses dengan 45 bawahan, saya harus memberikan arahan, mengevaluasi, dan menilai kinerja semua bawahan saya, termasuk juga memberikan izin untuk berbagai keperluan mereka. Sekarang sebagai Sekretaris pastinya lebih sibuk, apalagi dengan kondisi belum ada Wakil Sekretaris seperti saat ini sehingga semuanya harus diselesaikan oleh Sekretaris.

Dengan kesibukan Bapak yang demikian, bagaimana Bapak menjamin terciptanya *work life balance*?

Sebetulnya menurut saya ini adalah masalah manajemen waktu. Dulu ketika menjadi Wases, waktu saya relatif lebih longgar. Sekarang dengan kondisi sendirian sebagai Sekretaris, saya harus lebih disiplin mengalokasikan waktu dalam bekerja. Misalnya, setelah sampai di kantor apa yang harus saya kerjakan dan berapa lama durasi maksimal pekerjaan harus diselesaikan. Kadang-kadang saya menargetkan waktu untuk menandatangani berkas, misalkan dalam 40 menit, apabila tidak selesai dalam waktu tersebut, maka saya harus tinggalkan terlebih dahulu apabila terdapat agenda yang *urgent* untuk dihadiri.

Tantangan atas kesibukan itu adalah masalah manajemen waktu dan juga skala prioritas, bila dikaitkan dengan waktunya ada yang mendesak atau tidak mendesak. kemudian dari sisi urgensinya, ada yang penting atau tidak penting. Jika penting dan mendesak maka harus diprioritaskan, apapun harus bisa ditinggalkan apabila ada urusan penting dan mendesak. Namun apabila penting dan tidak mendesak masih bisa ditunda waktu pelaksanaannya. Kemudian apabila mendesak tapi tidak terlalu

penting, bisa saya delegasikan penugasannya. Saya melihat dalam banyak hal, dikaitkan dengan banyaknya pekerjaan dan keterbatasan SDM, mau tidak mau kita harus bisa memanfaatkan IT sehingga bisa lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan tugas sehari-hari.

Di tengah kesibukan Bapak yang sangat padat, apakah Bapak masih meluangkan waktu untuk diri sendiri atau *me time*?

Saya mengambil waktu sendiri untuk mengevaluasi diri. Biasanya kalau kita sudah sering berkorban baik waktu, tenaga dan pikiran tapi akan selalu ketemu dengan orang yang complain atau merasa tidak puas atas *effort* yang sudah diberikan, maka apabila hal ini tidak mampu dikelola dengan baik, kita akan mudah stress dan patah semangat. Dalam bekerja ada dua hal yang selalu saya tanamkan dalam diri saya, yaitu sabar dan ikhlas. Kenapa kita perlu bersabar, karena dengan ini akan dapat menjaga emosi dan pikiran kita lebih stabil serta dalam banyak hal kita tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan instan, namun tetap memerlukan waktu. Lalu kenapa kita harus ikhlas, karena walaupun sudah bekerja dengan baik, belum tentu respon orang akan baik juga. Entah itu pujian atau celaan jangan terlalu diambil pusing. Dengan seperti ini hati kita akan menjadi lebih tenang dan terlepas dari pengharapan yang tak pasti serta dapat membantu kita untuk menghargai apa yang kita miliki saat ini. Saya juga termasuk yang meyakini bahwa hidup kita ini sesungguhnya tidak lepas atau bagian dari menjalani takdir saja, termasuk ketika saya diminta menjadi Ses, bisa jadi itu bukan karena kelebihan saya namun karena saya ditakdirkan untuk itu. Apabila kita *baperan* terhadap respon orang terhadap kita, maka bisa dipastikan akan mudah stress dan depresi. Untuk hal di luar kendali, saya meyakini bahwa itu merupakan takdir saya, jadi berusaha ikhlas menerimanya. Saya hanya bisa berikhtiar dengan memperbaiki hal-hal yang ada dalam kendali saya dan tidak terlalu peduli pada hal-hal yang ada di luar kendali.

Selanjutnya, program kerja seperti apa yang Bapak siapkan sebagai Sekretaris?

Sebetulnya target saya, dalam tiga tahun ini bisa ikut mengawal proses transisi Pengadilan Pajak ke MA dengan baik atau istilahnya ada proses transisi yang *soft landing*. Meskipun posisi kita sebagai objek, namun kita juga harus terlibat memberikan insight, karena kita yang paling mengerti Pengadilan Pajak itu seperti apa. Atas dasar itu pada Bulan Maret lalu, saya telah membentuk tim transisi Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung, yang sudah disesuaikan juga dengan kelompok kerja yang ada di Mahkamah Agung. Kemudian di level Kemenkeu, kita akan membentuk *Squad Team* atau pokja yang melibatkan Eselon 1 lainnya yang terkait dengan proses transisi ini.

Pada tahun 2024 ini target kita adalah mengidentifikasi potensi masalahnya, merumuskan juga kira-kira *road map* atau *grand design* Pengadilan Pajak akan seperti apa. Kemudian pada tahun 2025 mungkin akan lebih banyak membahas terkait regulasi. Harus ada dukungan regulasinya, kita perlu melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait seperti MA, BKN, MenPANRB, BKF, dll. Lalu kemudian di tahun 2027 kita akan pindah ke Mahkamah Agung.

Apabila dikaitkan dengan layanan yang ada di kita, harapan saya semua layanan yang ada di Pengadilan Pajak bisa terus menerus dibuat lebih baik lagi sehingga proses *continuous improvement* itu terus berlanjut baik dari aspek kemudahan akses, simplifikasi, dan kecepatan layanan. Termasuk juga layanan secara elektronik, kita harapkan bukan sekedar digitalisasi saja namun digitalisasi ini menjadi langkah awal dalam proses otomasi.

Terkait dengan modernisasi yang telah ada saat ini, bagaimana strategi Bapak memastikan keberlanjutan modernisasi di Pengadilan Pajak?

Terkait automasi layanan akan terus kita upayakan. Langkah awal tentunya perlu perubahan dari proses yang sebelumnya manual menjadi digital. Tugas dan pekerjaan yang sifatnya berulang dan menyita sumber daya seharusnya mulai bisa diotomasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi kesalahan yang sifatnya

human error. Apalagi yang tidak memerlukan pertemuan langsung dan juga dokumen fisik, kita otomatisasi untuk memberikan kemudahan kepada pengguna layanan. Kita bisa buktikan bahwa automasi itu mempermudah. Dan untuk yang saat ini sudah berjalan, akan kita lakukan evaluasi secara terus-menerus. Ketika kita mengupayakan perbaikan di bidang IT, saya juga berharap internal kita ikut mendukung. Kalau dalam perjalanan ada sedikit kesalahan atau error saya kira itu hal yang wajar dan bagian dari pembelajaran untuk upaya perbaikan. Tentunya kita juga perlu siapkan mitigasi risiko atas kendala di layanan ketika ada kendala sistem sehingga pengguna layanan tetap dapat dilayani.

Terakhir, Pak, bagaimana harapan Bapak untuk Set. PP dan Pengadilan Pajak ke depannya?

Sesuai dengan Visi dan Misi Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan memutus secara adil dan memberikan kepastian hukum kepada pencari keadilan, jadi kita harus senantiasa memberikan keadilan dan juga kepastian hukum. Salah satu tantangan yang sering dikeluhkan para pihak adalah lamanya waktu penyelesaian pemeriksaan sengketa, tunggakan sengketa yang besar dan adanya disparitas putusan. Mudah-mudahan ke depan hal ini mulai bisa dieliminir dengan mulai diimplementasikannya *court calendar* dan adanya aplikasi *profiling sengketa*, *artificial intelligent* dan *landmark putusan* serta upaya *monev* secara berkelanjutan.

Terkait dengan SDM, oleh karena proses bisnis di Pengadilan Pajak risiko *fraud*-nya sangat tinggi, saya berharap baik hakim maupun pegawai tetap menjaga nilai integritas dan juga saling mengingatkan, jangan sampai mendiamkan saja apabila mengetahui ada potensi penyimpangan terkait *fraud*. Kemudian dari sisi fasilitas dan kenyamanan dalam bekerja, harapannya bisa terpenuhi meskipun prosesnya dilakukan secara bertahap. Selain itu, mengingat saat ini ada beberapa pegawai yang sakit, mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih menjaga keseimbangan atau *work life balance* antara waktu dan energi yang digunakan baik itu pola kerja, pola makan dan pola



istirahat. Jangan sampai pekerjaan yang membuat kita sakit.

Selanjutnya terkait dengan hubungan personal, saya berharap antar pegawai dan hakim di Pengadilan Pajak bisa membangun komunikasi yang baik dan harmonis sehingga dapat lebih produktif dan efektif dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan sehari-hari.

Terakhir terkait dengan gedung, ke depan saya berharap kita dapat memiliki ruang kerja yang lebih nyaman. Terlepas apakah milik sendiri atau meminjam, yang penting bisa digunakan menjadi tempat kerja yang lebih memadai sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas layanan kepada para *stakeholder*.

Teks: Riz



e-TAX COURT

Yang Tercapai di SetPP 2023

modern dan praktis

Kilas Balik Satu Tahun yang Lalu

Tahun 2023 merupakan tahunnya e-Tax Court, karena pada tahun ini Sistem Informasi Pengadilan Pajak mulai diimplementasikan. Mulai dari finalisasi sistem, regulasi dan proses bisnis, dilanjutkan dengan *launching* dan beberapa sosialisasi. Namun, bukan hanya e-Tax Court, masih banyak kegiatan-kegiatan lain baik kegiatan rutin maupun yang baru dilakukan di tahun ini. Lantas apa saja yang telah dilalui Pengadilan Pajak selama tahun 2023, berikut uraiannya.



20 Januari 2023: Pemilihan Wakil Ketua III Pengadilan Pajak

Pada awal tahun 2023 dibuka dengan pemilihan Wakil Ketua III Pengadilan Pajak yang berlangsung di Aula BPKP. Terdapat dua belas calon yang akan dipilih untuk menggantikan Seno Sulistyanto Budi Hendra. Pemilihan ini berlangsung dalam dua putaran dimana untuk putaran kedua, calonnya mengerucut menjadi Juwari Eddy Winarto dan Erry Sapari Dipawinangun. Kemudian, yang terpilih menjadi Wakil Ketua bidang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Hakim adalah Erry Sapari Dipawinangun.

17 Maret 2023: Siniar Integritas

Pada tanggal 17 Maret 2023, Sekretariat Pengadilan Pajak mengadakan webinar integritas dengan tema *"Lifestyle Choices and Integrity: Exploring the Impact on ASN's Public Image"* oleh narasumber R. Patrick Wahyudwisaksono S.E., M.Ak, CPM, CIO, CRMP, Asesor Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas KPK. Webinar ini bertujuan memperkuat budaya integritas di Sekretariat Pengadilan Pajak dengan paparan materi berupa bagaimana melawan korupsi, menghindari gaya hedonisme dan menghindari aksi pamer kemewahan di media sosial baik oleh pegawai maupun oleh keluarga.

4 Mei 2023: Pengambilan Sumpah Hakim Baru

Berdasarkan Keppres Nomor 29/P Tahun 2023 tanggal 6 April 2023 mengenai Pengangkatan Hakim Pengadilan Pajak, tujuh belas orang kandidat hakim, dari 53 orang kandidat hakim Pengadilan Pajak yang lulus seleksi pengetahuan dan penulisan makalah, diangkat dan ditetapkan sebagai hakim Pengadilan Pajak. Hakim baru tersebut dilantik oleh Ketua Pengadilan Pajak pada upacara pelantikan yang berlangsung di Aula Gedung BPKP Perwakilan Provinsi Banten dan dihadiri oleh para pimpinan Pengadilan Pajak, Pimpinan Sekretariat Pengadilan Pajak, hakim Pengadilan Pajak, serta Pejabat Eselon III di Set. PP.

Mei 2023: Perayaan Harlah Pengadilan Pajak

Pada tanggal 12 Mei 2023 Pengadilan Pajak berulang tahun ke-21. Acara Puncak Harlah Pengadilan Pajak tersebut diadakan di lapangan Gedung A Sekretariat Pengadilan Pajak. Acara dibuka dengan kegiatan senam pagi, dilanjutkan dengan sarapan bersama, TC Award, *Tax Court People's Choice*, pengumuman pemenang lomba, dan ditutup dengan makan siang bersama. Dalam rangka memeriahkan Harlah Pengadilan Pajak tersebut, Sekretariat Pengadilan Pajak telah mengadakan serangkaian perlombaan yang diikuti oleh para pegawai dengan antusias dan semangat.



20 Juni 2023: Pengambilan Sumpah Sekretaris Pengganti

Pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, melantik sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan baik yang promosi maupun mutasi. Sekretaris Pengganti yang dilantik antara lain: Ajeng Loshita, Euis Sofiah, Helfie Kartika Fatmasari, Kitty Kartika Eka Shanty, dan Mursal Harahap. Sekretaris pengganti tersebut, pada tanggal 20 Juni 2023, diambil sumpahnya sebagai Panitera Pengganti oleh Ketua Pengadilan Pajak. Acara pengambilan sumpah ini dihadiri oleh para pimpinan Pengadilan Pajak, Pimpinan Sekretariat Pengadilan Pajak, dan Pejabat Eselon III di Set. PP.

28 Juli 2023: Sosialisasi e-Tax Court

Pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023, Sekretariat Pengadilan Pajak melakukan sosialisasi Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2023 tentang Administrasi Sengketa Pajak dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Pajak yang telah ditetapkan pada tanggal 21 Juli 2023. Acara sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai aturan terkait e-Tax Court yang peluncurannya diadakan pada tanggal 31 Juli 2023.

31 Juli 2023: Launching dan Implementasi e-Tax Court

Peluncuran e-Tax Court dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2023 di Lobi Gedung A Sekretariat Pengadilan Pajak. Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan Pengadilan Pajak, pimpinan Sekretariat Pengadilan Pajak, pejabat di lingkungan Pengadilan Pajak, serta para pemohon Banding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat. Dengan adanya e-Tax Court, diharapkan para pihak dapat memperoleh kepastian hukum dengan segera dan keadilan dengan lebih mudah, cepat, dan sederhana. Peluncuran e-Tax Court ditandai oleh dilakukannya verifikasi akun pemohon pertama pada e-Tax Court oleh Ketua Pengadilan Pajak.

29 November 2023: Simulasi Gempa

Sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.01/2021 tentang Pedoman Manajemen Keberlangsungan Bisnis Kementerian Keuangan, guna untuk memberikan langkah-langkah antisipasi bagi organisasi dalam menghadapi kondisi kedaruratan secara terstruktur, salah satu kegiatannya, Kementerian Keuangan mengadakan simulasi gempa serentak pada tanggal 29 November 2023.

Simulasi gempa diawali dengan pemberian sambutan dari Menteri Keuangan dan Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak melalui *speaker* yang berada di tiap gedung. Kemudian pada pukul 10.00 WIB, sirine tanda gempa dibunyikan dan semua pegawai diminta untuk berlindung. Ketika sirine telah selesai, kemudian diberikan pengumuman bahwa telah terjadi gempa di lingkungan kantor. Selanjutnya para pegawai dievakuasi dengan dipandu *floor captain* sebagai koordinator di tiap lantai menuju titik kumpul. Setelah berkumpul, *floor captain* memberikan laporan kepada building manager untuk menjelaskan kondisi pegawai yang telah dievakuasi. Kemudian semua pegawai dikumpulkan di halaman sebelah Gedung F untuk mendapatkan pengarahan dari Sekretaris Pengadilan Pajak.

1 Desember 2023: Rapat Kerja Pengadilan Pajak

Rapat Kerja dan Seminar Pengadilan Pajak 2023 diadakan di Aula lantai 4 Gedung BPKP pada Hari Jumat, 1 Desember 2023. Tujuan diadakan Raker adalah sebagai sarana evaluasi atas kinerja yang telah dicapai, merumuskan Rencana Strategis Pengadilan Pajak kedepannya, serta mengembangkan kompetensi dalam menghadapi tantangan kedepan, baik yang bersifat teknis yudisial maupun *soft competency*. Materi yang disampaikan antara lain: seminar pembaruan oleh tim asistensi pembaruan Mahkamah Agung, penyampaian RPERKA Pengawasan Kuasa Hukum oleh tim regulasi, *Sharing Experiences* oleh

Tri Hidayat Wahyudi, dan paparan *Current Issue* oleh Pimpinan Pengadilan Pajak dan Sekretariat Pengadilan Pajak.

21 Desember 2023: Townhall Meeting

Untuk membangun komunikasi antara pegawai dengan pimpinan dalam menyamakan visi misi instansi dan juga menyampaikan pencapaian instansi selama tahun 2023, Sekretariat Pengadilan Pajak mengadakan *Townhall Meeting* pada tanggal 21 Desember 2023 di aula BPKP. Acara ini dihadiri oleh seluruh pegawai yang tidak menjalankan cuti tahunan, dibuka dengan menyaksikan video rekap kegiatan Set. PP pada tahun 2023. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi antara perwakilan pegawai dengan pimpinan Set. PP. Dan ditutup dengan pemaparan dari Sekretaris dan Wakil Sekretaris mengenai capaian Set. PP di tahun 2023 dan rencana Set. PP di tahun 2024.

Pengadilan Pajak terus berbenah, memperbarui sistem guna meningkatkan layanan kepada para pencari keadilan di bidang perpajakan. Tahun 2023 merupakan tonggak awal dimulainya transformasi pelayanan di Pengadilan Pajak yang ditandai dengan implementasi e-Tax Court. Semoga di tahun 2024 ini, pemberian layanan melalui e-Tax Court dan juga pengguna layanan dapat terus meningkat. Sehingga dapat mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dengan lebih cepat, modern dan praktis.

Teks: Riz dan Mega



HARAPAN 2024

Tak terasa, kita kembali berjumpa dengan tahun kabisat lainnya, tahun 2024. Banyak cerita telah terukir di unit yang kita cintai ini selama tahun 2023 yang lalu. Lantas, untuk menyongsong tahun yang baru, bagaimana harapan SobatPP untuk tahun 2024 ini? Berikut kita simak harapan dari beberapa SobatPP untuk tahun 2024.

Implementasi e Tax Court 100%

-Goal Keeper Hari Oeang 2023 -

Kiranya WFH dikembalikan. Selain itu FWS diperbanyak.

-Dari Aku Yg Menunggu Laptop ku Sejak 2022-

Kalau THP-nya belum bisa meningkat, paling nggak jaminan proteksi kesehatan dibayarin di luar BPJS yang proper, minimal selevel pegawai BUMN contohnya Pertamina, perbankan, Telkom ;

Peremajaan gear pegawai disesuaikan dengan visi digitalisasi (maksudnya komputernya yang canggih, layarnya besar) yang sekarang lemot, kursi yang bagus mendukung kenyamanan, kesehatan, dan produktivitas.

-Syaiful Djamil - PP-

PC layar besar. Atau pegawai dikasih opsi mau laptop atau komputer. Karena pakai laptop bikin mata pedes tampilan kecil2. Upgrade berkala tiap 5 taun. Kursi juga penggantian.berkala tiap beberapa tahun

- Dwi Sasono PP-

Pemanfaatan teknologi ditingkatkan untuk tools pegawai bikin RSB, BAS, Putusan. Jangan hanya hardware yg dipikirkan (laptop, PC, headset), software-nya juga perlu upgrade. Apalagi teknologi AI makin berkembang, sayang kalo tidak dimanfaatkan.

Misal:

1. Langganan app berbasis web untuk audio transkriptor dengan teknologi AI
2. OCR
3. Converter

--Catur Lover PP--

Learn from yesterday, fight for today, and hope for tomorrow. The most important thing is doing the best for our beloved SetPP. Semoga SetPP menjadi semakin baik di tahun 2024 dan seterusnya

--Kesayangannya Barra--

WFH diperbanyak

Gaji dan tunjangan, atau kalau harus pilih salah satu yang tunjangannya aja yooo ☐

---Anonym--

Karena TC Media sudah tidak memerlukan pencetakan, kiranya honor penulis digandakan.

---penulis Favorite TC Media -

Tak terasa sudah 10 tahun bergabung dengan SetPP. Harapan ku semoga walau diluar sana banyak tidak yakin dengan kemampuan kita, Mari kita buktikan bahwa ada banyak orang yang bekerja dengan sepenuh hati bagi lembaga ini. Semangat dan senantiasa berikan yang terbaik, karena Bekerja adalah bentuk ucapan syukur atas anugrah pengetahuan yang kita miliki

--Kabar Baik --

"Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Semakin banyak manfaat yang diberikannya, maka semakin baik pula nilai dirinya. Semoga SetPP di tahun 2024 menjadi semakin baik lagi dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi bangsa dan negara. Amin...Amin...Amin...."

--Barra Versi 30++ --



Pelatihan Kehumasan Setjen

Peningkatan Kompetensi Kehumasan: PT KAI dan Pemprov Jabar

Pada tanggal 13 s.d. 15 September 2023, Biro Umum Sekretariat Jenderal menyelenggarakan diklat kehumasan secara luring yang bertempat di Jakarta dan Bandung. Pelatihan tersebut diikuti oleh para perwakilan kehumasan di lingkungan eselon II Sekretariat Jenderal.

Panitia penyelenggara membagi seluruh peserta diklat ke dalam tiga kelompok. Setiap kelompok akan melakukan kunjungan ke setiap tempat yang berbeda. Kelompok tersebut terdiri dari kelompok kunjungan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jawa Barat), dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). Adapun agenda yang dilaksanakan meliputi *benchmarking* terkait manajemen strategi komunikasi, pelatihan kompetensi terkait manajemen strategi komunikasi, dan diskusi serta tanya jawab dengan para peserta.

Dalam kunjungan ke Dinas Komunikasi Provinsi Jawa Barat, perwakilan Dinas Komunikasi Pemrov Jawa Barat menerangkan bahwa Jawa Barat memilih menjadi provinsi yang fokus memberikan layanan digital dikarenakan memiliki wilayah yang luas dengan 50 juta penduduk (sekitar 20% total populasi Indonesia). Hal ini juga merupakan amanat Gubernur Jawa Barat terdahulu, Ridwan Kamil, yang mendorong Pemprov Jawa Barat melaksanakan digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

Dinas Komunikasi Pemprov Jawa Barat menjelaskan bahwa survei *e-government index* menempatkan Indonesia pada peringkat yang terus membaik, yaitu 77 pada tahun 2022, meningkat dari peringkat 88 pada tahun 2020, 107 pada 2018, dan 116 pada 2016. E-government index memiliki 3 komposit, yaitu: indeks pembangunan manusia, indeks infrastruktur telekomunikasi, dan indeks layanan online.



Mengenai indeks pembangunan manusia, Provinsi Jawa Barat memiliki indeks literasi digital sebesar 3,6, diatas rerata nasional sebesar 3,5. Mengenai infrastruktur telekomunikasi, masih terdapat 359 desa dari total 5.311 desa di Provinsi Jawa Barat yang belum memperoleh akses internet. Kemudian untuk indeks layanan online, terdapat 22.144 review dari pengguna layanan aplikasi Pemprov Jawa Barat di Google Play Store dengan rerata skor 3.0 (skala 5.0). Hal ini disebabkan oleh keadaan Pemprov Jawa Barat yang memiliki keterbatasan SDM maupun anggaran, sehingga memilih fokus untuk mengembangkan tiga aspek prioritas dalam memberikan layanan, antara lain penggunaan *big data*, pengembangan kesejahteraan komunitas, dan transformasi digital.

Pemanfaatan *big data* pada Pemprov Jawa Barat dilakukan melalui ekosistem data Jawa Barat (EDU) yang dapat diakses melalui *website* [opendata Jawa Baratprov.go.id](http://opendata.jawabaratprov.go.id). Salah satu keberhasilan EDJ adalah singkat pengembalian bantuan sosial (bansos)



Covid-19 yang disalurkan melalui Pemprov Jawa Barat sangat kecil, yaitu dibawah 5%.

Penggunaan EDJ mendorong data penerima bansos Jawa Barat menjadi lebih akurat sehingga meminimalisasi duplikasi penerima bansos. Keberhasilan bantuan masyarakat membeli minyak goreng ketika terjadi kelangkaan pada triwulan 8-10 tahun 2023. Pembelian minyak goreng tersebut dilakukan oleh ketua RW setempat setelah melakukan kompilasi pesanan warga untuk kemudian pemesanan dilakukan melalui aplikasi *super apps* Jawa Barat yaitu “Sapa Warga”.

Pengembangan kesejahteraan komunitas pada Pemprov Jawa Barat dilakukan melalui program desa digital yang memiliki empat tingkatan. Tingkat 1 yaitu *smart infrastructure* yang berfokus menyediakan layanan internet pada pedesaan. Tingkat 2 yaitu *smart society* yang berfokus pada pendampingan warga dengan menggunakan internet untuk berkomunikasi dan mengakses informasi .Tingkat 3 *smart economy* yaitu memberikan pelatihan yang terkait dengan digital *marketplace* kepada wirausaha desa dan Badan Usaha Mak Desa (BUMDs). Tingkat 4 yaitu *smart enviroment* yaitu meningkatkan produktivitas warga desa supaya dapat miliki usaha yang mandiri dan berkelanjutan.

Mengenai konsep dimaksud, Pemprov Jawa Barat telah membangun *website* Pahlawan Desa sebagai *platform* yang mengkoneksikan mus *marketplace*. Penerima manfaat dan program pengembangan kesejahteraan komunitas Pemprov Jawa Barat hingga kini telah mencapai 3.067 komunitas wirausaha dan 2.248 desa digital Provinsi Jawa Barat.

Untuk meningkatkan literasi dan *talent digital*, Pemprov Jawa Barat menginisiasi kegiatan peningkatan kapasitas SDM digital. Kegiatan tersebut diantaranya melalui penyelenggaraan Candradimuka Jabar Coding Camp (CJCC) dimana warga yatim piatu mendapatkan prioritas. Pemprov Jawa Barat juga membangun Jabar *Digital Services* dengan sistem kerja *agile* dengan model kolaborasi *pentahelix* dengan dengan para pemangku kepentingan terkait.

Saat ini Pemprov Jawa Barat tengah memproses permintaan dari Menteri Keuangan dalam hal uraian narasi *impact* dari pembangunan menggunakan anggaran negara. Dengan memanfaatkan *open data*, Jawa Barat memperoleh data mengenai jumlah pengentasan kemiskinan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang menggunakan anggaran dari pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Teks: Hafiz

WILAYAH KERJA KANTOR WILAYAH DJP ACEH



KPP PRATAMA LHOKESEUMAWE
Jl. Merdeka No. 144, Muar Seumawe, Kota Singing
Banda Aceh, Aceh 95111
Telepon (064) 212271 KP (064) 212271

KP2KP LHOKEUKOH
Jl. Medan - Syamsudin, Intanmawati, Kecamatan Lhokukoh,
Kabupaten Aceh Utara, Aceh 95177
Telepon (064) 21515 KP (064) 21515

KPP PRATAMA BIREUEN
Jl. Pahlawan - Banda Aceh - Candieng, Kota Singing,
Kabupaten Bireuen, Aceh 95111
Telepon (064) 212271 KP (064) 212271

KP2KP TAKENGON
K.L. No. 100, Jalan No. 100, Kecamatan Takengon,
Kabupaten Aceh Tengah, 95214
Telepon (064) 21901 KP (064) 21901

KP2KP RIMBA RAYA
Jl. Garuda Raya, Kecamatan Tigo Reueng, Kota Singing,
Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh 95214
Telepon (064) 21901 KP (064) 21901

MA LANGSA
Jl. Raya Bank Tunjung,
Kota Singing, Aceh 95111

Cerita Program Secondment 2023

Pertukaran Pegawai Lintas Unit Eseon 1

Apakah Sobat PP mengetahui tentang program sejenis pertukaran pegawai antar instansi unit eselon I di Kementerian Keuangan? Program tersebut adalah Secondment Kementerian Keuangan.



Pengertian dan Tujuan *Secondment*?

Program *Secondment* yang dikelola oleh Biro SDM Setjen Kemenkeu menjadi upaya pengembangan kompetensi pegawai Kemenkeu guna meningkatkan kinerja SDM dan organisasi. Program ini telah berjalan beberapa tahun dimulai sejak tahun 2017. *Secondment* memberi kesempatan para peserta yang disebut *seconded* untuk merasakan, mengamati, terlibat aktif, dan turut memecahkan permasalahan yang ada di lokasi *secondment* atau yang akan disebut sebagai lokus.

Analoginya seperti pertukaran pegawai untuk sementara waktu karena tujuan utama program *secondment* adalah untuk meningkatkan kapasitas pegawai. Di edisi tahun 2023 ini, Biro SDM membuka enam belas subtema *secondment* untuk pegawai Kemenkeu. Apabila dihitung pada seluruh instansi di Kemenkeu, maka jumlah ini akan bertambah karena unit eselon I lain juga mengadakan program *secondment* yang mendukung fungsi unit eselon I masing-masing yang bahkan dapat melibatkan non pegawai kemenkeu baik PNS maupun BUMN. Ke-16 subtema *secondment* yang dikelola oleh Biro SDM pada tahun ini menginduk pada lima tema besar yaitu Pengelolaan Penerimaan Negara; Pengelolaan Belanja Negara; Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; Pengelolaan Ekonomi Regional, UMKM, dan Kerja

sama Internasional; Pengelolaan Asset; dan Dukungan Manajemen.

Cara Mendaftar dan Benefit

Untuk menjadi peserta *secondment*, Sobat PP harus telah menyelesaikan ST Tugas Belajar karena memang target peserta adalah para *ex-awardee* yang harus menjalankan program *re-entry*. Pihak Biro SDM melalui pengelola SDM pada setiap unit eselon II akan mencalonkan nama Sobat PP lalu diseleksi oleh Biro SDM. Dengan mengikuti program ini, *seconded* mendapatkan banyak benefit seperti pengalaman bekerja di lingkungan baru, perspektif kinerja Kemenkeu dari sudut pandang yang lebih luas, menambah poin prestasi kerja dan manajemen talenta, benefit keuangan, dan *short escape* dari rutinitas tapi masih berkarya dalam lingkup kerja Kemenkeu.

Subtema Penguatan Regional Chief Economist

Pada edisi *secondment* September hingga Oktober 2023, Set. PP mengirimkan tiga pegawai sebagai peserta program *secondment*. Salah satunya Saya, Sukindar Ari Santoso, yang ditempatkan di Subtema Penguatan Regional Chief Economist (RCE) sebagai salah satu subtema *secondment* dalam lingkup pengelolaan ekonomi regional, UMKM, dan kerja sama internasional. Secara singkat, subtema *secondment* penguatan RCE merupakan peningkatan dan

penguatan fungsi perwakilan Menteri Keuangan yang dilaksanakan oleh unit eselon I yang ada di setiap daerah yaitu DJPB, DJP, DJKN, dan DJBC.

Secondment dengan subtema Penguatan RCE menjadi yang terpanjang di antara enam belas subtema yang ditawarkan. Dimulai dengan pembekalan secara daring sejak tanggal 19 September 2023, para peserta diberikan pelatihan dasar pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjadi ekonom regional hingga 29 September 2023. Subtema Penguatan RCE memiliki karakteristik khusus karena menjadi satu-satunya program *secondment* tahun 2023 yang dilaksanakan secara luring di masing-masing lokus karena arahan dari Menteri Keuangan.

“Agar dilakukan *Secondment* pegawai pusat ke daerah. Seluruh insan Kementerian Keuangan harus mampu berperan dan mengambil inisiatif di berbagai bidang dan pelosok negeri, memiliki sensitivitas dan kerangka berpikir sebagai policy maker untuk memastikan uang negara yang tersalurkan benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan Indonesia.” Ucap Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat pengarahannya program *secondment*. Alhasil kami melaksanakan program ini hingga 2 Desember 2023 di seluruh lokasi yang ditetapkan.

Secondment Penguatan RCE ditempatkan di Kanwil DJPb tepatnya di masing-masing Bidang Pembinaan

dan Pelaksanaan Anggaran II yang menangani pengelolaan BLUD, perekonomian daerah, TKD, dan investasi daerah. Pada tahun 2023, *Secondment* Penguatan RCE dilaksanakan pada lima belas Kanwil DJPb dan akan menjadi 34 Kanwil pada 2024. Saya ditempatkan di Kanwil DJPb Aceh dan turut serta dalam kegiatan PPA II selama dua bulan.

Para *secondment* terlibat aktif dalam setiap kegiatan pengembangan ekonomi regional bersama agen-agen Kemenkeu satu di daerah. Bukan hanya itu, para *secondment* harus dapat merumuskan masalah dan memberikan analisis dan rekomendasi di akhir masa *secondment*. Masalah yang diangkat bebas ditentukan oleh para *secondment* karena memang menjadi arahan untuk memunculkan isu yang belum terangkat oleh organisasi pelaksana rutinnya.

Pada setiap akhir bulan kegiatan *secondment*, dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan *secondment*, mentor, Biro SDM, dan tim Panelis dari DJPb. Tim kami terdiri dari Saya dan Fakhrrurrazi dari Set.Ditjen Pajak, yang mengangkat penelitian mengenai peningkatan kepatuhan penyusunan berita acara rekonsiliasi pajak-pajak pusat oleh Pemerintah Aceh.

Teks: Shuk



Hari Oeang 77

Liputan Hari Oeang 77



Pada tanggal 30 Oktober 1946, uang kertas Republik Indonesia pertama kali beredar, menandai momen bersejarah ketika Indonesia mencetak mata uang sendiri. Hari Oeang Nasional diperingati setiap tahun untuk mengenang lahirnya mata uang pertama bangsa Indonesia, Oeang Republik Indonesia (ORI). Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara menjadi pionir dalam mengusulkan penerbitan mata uang Indonesia, tetapi keterbatasan sumber daya dan kehadiran Belanda membuatnya tertunda. ORI, yang ditujukan untuk menunjukkan kedaulatan Indonesia dan mengatasi inflasi, akhirnya ditetapkan sebagai alat pembayaran yang sah pada tanggal 30 Oktober 1946, dan tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Oeang Nasional (HORI).



Pada peringatan HORI ke-77 tahun 2023, Kementerian Keuangan mengadakan berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain lomba debat, Oeang chess tournament, lomba tenis lapangan, lomba tenis meja, Kemenkeu Got Talent, E-Sport, turnamen sepak bola, lomba bola basket 3 on 3, lomba panahan, badminton oeang cup, oeang run, fun bike 2023, lomba bola voli, lomba voice over, lomba baca puisi, lomba video pendek, lomba fotografi, MoF band competition, upacara HORI, kegiatan bakti sosial, kegiatan donor darah, dan hibah BMN tidak terpakai. Rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 4 September 2023 hingga 30 Oktober 2023.

Momen puncak dari peringatan HORI ke-77 adalah *Family Gathering*, yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 2023 di halaman Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan. *Family Gathering* tidak hanya menjadi ajang hiburan dan kebersamaan, tetapi juga wadah untuk memupuk semangat kekeluargaan di antara sekitar 3000 peserta, termasuk pegawai, Badan Layanan Umum (BLU), dan *Special Mission Vehicle* (SMV) di lingkungan Kementerian Keuangan.

Selain beragam kegiatan seni dan olahraga, momen ini menjadi waktu yang tepat untuk mengumumkan dan memberikan penghargaan kepada para pemenang berbagai lomba yang telah diadakan, termasuk penyerahan piala juara umum sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi yang telah diraih oleh seluruh peserta. Acara berlangsung meriah, menonjolkan semangat kompetisi dan kebersamaan yang menjadi pilar utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di Kementerian Keuangan.

Peringatan HORI ke-77 diakhiri dengan harapan bahwa kesadaran akan pentingnya mempertahankan kedaulatan melalui mata uang Rupiah tetap hidup dan menjadi landasan kuat bagi kemajuan Bangsa Indonesia di era modern. Seiring dengan rangkaian acara dan kompetisi yang diadakan, Kementerian Keuangan berhasil menciptakan momentum yang positif, memperkuat keterlibatan semua pihak, dan meneguhkan peran strategisnya dalam mengelola keuangan negara serta membangun semangat kebersamaan di tengah-tengah lingkungan kerjanya. Semoga peringatan HORI ke-77 ini menjadi pijakan untuk langkah-langkah inovatif dan berkelanjutan, menuju masa depan yang lebih baik bagi perekonomian dan keuangan Indonesia.

Teks: Dhila



Tugas Belajar

Kabar kawan di luar Kantor

Selain menjalankan tugas di kantor, rekan-rekan kita ini juga menjalankan tugas mereka sebagai ASN untuk meningkatkan edukasi dan kemampuan mereka. Mari kita sapa rekan kita, Penny Febriana dan Dian Amalia Kahfi yang saat ini sedang menjalankan tugas belajar. Kita simak cerita apa saja yang mereka bawa saat mereka menimba ilmu di kampusnya masing-masing.

Cerita Penny

Hai Penny, apa kabar? Sudah kangen Indonesia belum?

Kabar baik. Selalu kangen Indonesia, terutama makanannya dan kangen kopi susu gula aren.

Boleh cerita mengenai kampus dan beasiswa yang diambil, Pen?

Aku kuliah di School of International and Political Affairs, Columbia University, mengambil

jurusan Master of Public Administration. Kuliahnya intersection antara ilmu ekonomi, hubungan internasional, dan politik. Jurusan yang aku ambil lumayan broad, jadinya di dalamnya dibagi lagi jadi beberapa concentration dan specialization. Konsentrasi yang aku ambil adalah *International Finance & Economic Policy (economic track)* dan spesialisasi *Data Analytics & Quantitative Analysis*.

Untuk beasiswa yang aku ambil dari LPDP, jalur yang targetted PNS/TNI/POLRI.



Menurut kamu, apakah tuisi pekerjaan menginspirasi dan berhubungan dengan kuliah yang diambil saat ini?

Hmm... pertanyaan yang sulit ya. Mungkin tidak di-*translate* secara langsung untuk bisa dikatakan tuisi selama berkerja di Set. PP menginspirasi jurusan yang diambil. Tapi lebih melihat ke *bigger picture* peran Kemenkeu di Indonesia. Dan yang sebenarnya jadi pendorong untuk S2 itu karena merasa ada hal-hal dalam birokrasi yang masih punya ruang sangat besar untuk di-*improve*. Jadi jurusan yang diambil juga tidak *directly relate ke nature* dan *scope* pekerjaan di Set. PP, tapi lebih ke peran sebagai ASN di Kemenkeu.

Tapi di kuliah banyak banget ter-*expose* dengan birokrasi di berbagai negara dan bagaimana negara-negara maju *ngadepin challenge* untuk berinovasi untuk memperbaiki institusi pemerintahan, yang menurutku juga relate untuk dibawa saat balik, jadinya sekarang lebih punya *framework* untuk *maximizing impact within the constraints*.

Apakah ada saran untuk rekan-rekan yang belum atau ingin melanjutkan kuliah? Utamanya terkait kerjaal, misal punya usecase tertentu dari kantor atau memang punya kesesuaian kebutuhan organisasi.

Untuk saran, kadang kita tidak sadar kalo masalah yang dihadapi di kantor itu ternyata butuh ilmu lebih yang bisa kita dapetin dengan S2. Menurutku nggak ada satu cara pasti gimana orang bisa nemuin, framing masalah itu jadi *force* untuk S2, dan akhirnya bisa memilih jurusan yang tepat. Tapi kalo aku pribadi, yang aku lakuin itu emang *go back and forth research* tentang program-program S2, lebih mindful dalam ngeliat masalah yang dihadapi di kerjaan, dan juga mungkin jadi lebih sering merenung lima tahun ke depan mau ngapain. Selain itu, menurutku ngobrol sama orang yang sudah S2 atau juga berniat S2 sangat membantu. membantu nambah semangat dan juga membantu untuk *brainstorming* untuk *connect* antara kerjaan dan S2.

Apa pengalaman studi yg paling berkesan disana? Bisa jadi tentang culture shock atau pengalaman baru.

Secara akademik, sistem belajar disini beda sama yg aku hadepin di S1. Tidak semua lebih baik, Namun tidak semua lebih buruk. Plus minus, lah.

Tapi menurutku aspek yang paling *life changing* adalah disini dosen-dosennya lebih menghargai *effort* dibandingkan hasil. Benar-benar cukup sering mengapresiasi murid dan menyuruh untuk tidak berorientasi pada nilai. Akses dan support untuk kita benar-benar bisa belajar juga lebih banyak. Dosennya bisa didatengin di luar kelas untuk diskusi, bahkan diskusi yg agak keluar topik kelas.

Untuk kehidupan sosial, *culture shock* tidak bisa dihindari, menurutku. Banyak banget contohnya tapi nanti panjang. Hmm... *challenge* yang paling besar untuk aku *personally* adalah agak susah untuk *socially connected* dan membangun hubungan yg bener-bener akrab dengan orang-orang yg beda *culture*. Lama banget untuk bisa benar-benar akrab karena rata-rata orang non-Indonesia emang hobi *small talks* aja. Tapi terbantu karena disini memang asal *students*-nya *diverse* banget dan juga banyak yang dari Asia, jadi menurutku *at the end*, kita harus terima ada *certain degree* dimana kita bisa *adjust*, dan bisa menemukan celah bagaimana membangun *social connection* dengan murid yang memiliki *background* berbeda-beda.

Karena edisi ini edisi akhir tahun, kira-kira kamu ada goals untuk tahun depan?

Tahun depan lulus. Doain ya, semoga lancar. Di semester terakhir ada *capstone project*. Jadi kerja bersama real client. Menurutku bakal *challenging*. Seneng tapi deg-degan juga. Dan mungkin karena sudah mau lulus, mulai siap-siap lagi menghadapi kehidupan kantor setelah S2, mesti *adjust* lagi pasti. Jadi semoga lancar juga untuk siap balik ke kantor lagi.

Cerita Lia

Hai apa kabar, Lia? Sudah kangen kantor belum?

Alhamdulillah baik dan sehat. Sejujurnya belum kangen kantor karena masih bisa *update* informasi melalui email ataupun media sosial.

Boleh cerita mengenai kampus dan beasiswa yang diambil, Lia?

Jadi aku kuliah di Magister Akutansi, FEB UGM. Pertimbangannya karena ingin memperdalam Ilmu Akutansi sekaligus perpajakan yang ada di Indonesia, jadi pilih universitas yang ada di dalam



negeri. Beasiswa yang di-apply LPDP karena memang kesempatan LPDP ini luas banget khususnya bagi PNS dan dana yang di-cover juga baik. Selain itu, beasiswa LPDP ini banyak penerimanya dari seluruh Indonesia, jadi bisa bangun relasi yang banyak dengan sesama penerima beasiswa.

Menurut kamu, apakah tuisi pekerjaan menginspirasi dan berhubungan dengan kuliah yg kalian ambil sekarang?

Tentu saja menginspirasi, selama ini di Majelis ketika mengikuti persidangan, baru sekedar tahu tentang berbagai kasus akuntansi, perpajakan, administrasi, dan yuridis yang ada. Materi kuliah memang beberapa ada yang berkaitan langsung, namun kesempatan untuk berdiskusi dengan rekan sekelas dari DJP dan DJBC membuat pemahaman tentang unsur perpajakannya lebih komprehensif. Kebetulan di kelas banyak mahasiswa tugas belajar dari Kemenkeu juga yang sudah senior, jadi sering

membahas masalah-masalah perpajakan atau keuangan yang terjadi di *real life* kemudian dikaitkan dengan materi perkuliahan.

Apakah ada saran untuk rekan-rekan yang belum atau ingin melanjutkan kuliah? Utamanya terkait kerjaal, misal punya usecase tertentu dari kantor atau memang punya kesesuaian kebutuhan organisasi.

Pertama, harus ada tekad dan tujuan yang jelas untuk melanjutkan pendidikan. Untuk bisa menyelesaikan pendidikan sampai akhir pasti akan menemui banyak kendalanya. Selama ini kalau bekerja waktunya dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, sedangkan kuliah waktunya lebih fleksibel, namun bisa sampai malam ataupun berhari-hari untuk menyelesaikan satu tugas. Selama ada kesempatan, lebih baik diambil, karena nggak selalu first attempt akan berhasil, jadi bisa menghabiskan jatah kegagalannya dulu.

Apa pengalaman studi yg paling berkesan disana? Bisa jadi tentang culture shock atau pengalaman baru.

Pengalaman yang berkesan lebih ke pembelajaran yang bisa full diskusi. Selama ini aku pribadi masih malu ataupun ragu misalkan dalam mengeluarkan pendapat. Tapi disini setiap pendapat itu penting dan diperhatikan, karena asalnya yang berbeda-beda jadi sudut pandang dalam menyikapi sesuatu juga berbeda. Otomatis hal ini melatih percaya diri, karena dalam diskusi ga ada yang salah ataupun benar. Culture shocknya lebih ke tugas kenapa banyak banget, haha.

Karena edisi ini edisi akhir tahun, kira-kira kamu ada goals untuk tahun depan?

Goals utama jelas untuk menyelesaikan thesis karena harus melalui beberapa kali ujian sebelum lulus (doakan yak). Sambil menyelesaikan thesis, ingin belajar hal-hal baru misalkan latihan jenis olahraga baru, *public speaking* ataupun lainnya.

Teks: Astris



Kemenkeu Mengajar 8

Satu Hari Mengajar, Selamanya memberi Arti

Satu hari mengajar, selamanya memberi arti. Ungkapan tersebut sangat cocok menggambarkan hari yang dimulai ketika kami berdiri tersenyum di depan gerbang sekolah menyambut langkah-langkah penuh semangat yang datang dengan riang gembira. Tangan mereka terjulur menggapai tangan kami serta menciumnya dengan tulus, dan senyumnya yang polos mengiringi kata manis yang terucap, “Selamat pagi, Kakak!” sapa mereka. Hari itu sangat berarti bagi kami, para relawan Kemenkeu Mengajar. Dan hari yang penuh arti juga bagi mereka, bibit-bibit unggul penerus bangsa.

Senin, 23 Oktober 2023 merupakan hari dimana terselenggaranya Kemenkeu Mengajar 8 yang dilaksanakan di SD, SMP, SMA dan sederajat serta melibatkan juga Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN). Pada awalnya Kemenkeu Mengajar hanya terselenggara di SD yang tersebar di Indonesia. Di tahun 2016, Kemenkeu Mengajar 1 diselenggarakan di 36 SD di enam kota. Kemudian di tahun 2017, Kemenkeu Mengajar 2 diselenggarakan di 138 SD di 51 kota. Kemenkeu Mengajar dilaksanakan rutin setiap tahun hingga di tahun 2021 diselenggarakan di 347 sekolah pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan sederajat yang terletak di Indonesia dan luar negeri.

Relawan Kemenkeu Mengajar terbagi menjadi 5 peran yaitu panitia pusat, panitia daerah, fasilitator, dokumentator, dan pengajar. Panitia daerah merupakan relawan yang berada di daerah yang bertugas menjadi koordinator pelaksanaan Kemenkeu Mengajar di daerah tersebut dengan koordinasi dari panitia pusat. Fasilitator bertugas sebagai penghubung kegiatan Kemenkeu Mengajar baik kepada sekolah yang ditunjuk maupun kepada panitia pusat dan daerah. Dokumentator bertugas mendokumentasikan setiap momen kegiatan dalam bentuk foto maupun video. Sementara, pengajar memiliki tugas mengajarkan profesi dan peran Kementerian Keuangan dalam mengelola perekonomian kepada siswa.

Kegiatan Kemenkeu Mengajar berlangsung selama satu hari. Kegiatan ini mengusung semangat kesukarelaan. Hal ini disebabkan tidak adanya pungutan yang dibebankan panitia baik kepada pihak sekolah maupun relawan, tidak ada *sponsorship* dari luar Kementerian Keuangan, tidak terdapat pembayaran honorarium maupun SPD, dan tidak ada pembebanan terhadap APBN atas biaya-biaya yang ditimbulkan. Semua biaya yang ditimbulkan atas penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan kepada relawan. Bagi para relawan, imbalan yang diharapkan

atas apa yang diberikan adalah terciptanya generasi emas yang cerdas dan berkarakter yang memajukan perekonomian negara di masa depan.

Materi yang diberikan oleh relawan pengajar antara lain: pengetahuan tentang pengelolaan keuangan pribadi, tugas dan fungsi Kementerian keuangan, pengertian dan manfaat APBN, nilai-nilai Kementerian Keuangan, dan cara berperilaku yang mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan dan digital literacy. Melalui materi tersebut, terdapat empat tujuan utama yang ingin dicapai.

Pertama, memperluas pengetahuan siswa terkait profesi dan tugas di Kementerian Keuangan. Dengan demikian, siswa-siswa dapat mengetahui berbagai profesi di Kementerian Keuangan tidak hanya terkait petugas pajak dan bea cukai saja. Diharapkan, hal ini dapat memotivasi mereka dalam mengejar cita-cita di bidang pengelolaan keuangan negara.

Kedua, membangun kesadaran akan pentingnya literasi keuangan. Dengan mengetahui dasar-dasar literasi keuangan, siswa-siswa diharapkan dapat membuat keputusan keuangan yang cerdas di masa depan dan turut berkontribusi dalam pembangunan negara ini. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya siswa dapat mengetahui bagaimana mengelola uang saku yang baik yaitu dimulai dari perencanaan pengeluaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta menyisihkan uang untuk ditabung atau diinvestasikan.

Ketiga, menanamkan nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan serta memberikan contoh-contoh perbuatan yang mencerminkan masing-masing nilai tersebut kepada siswa. Diharapkan, nilai-nilai Kementerian Keuangan dapat menjadi nilai moral positif bagi para siswa sebagai jalan untuk mewujudkan impian mereka.

Keempat, menjalin hubungan yang positif antara Kementerian Keuangan dan generasi muda sehingga menciptakan komunikasi yang efektif serta membangun kesan positif tentang Kementerian Keuangan di mata generasi muda. Hal ini akan memberikan dampak bagi siswa ketika nanti mereka akan menjadi pemimpin di masa depan.

Sebelum dan setelah relawan pengajar menyampaikan materi, terdapat kegiatan pengisian pre dan post test oleh siswa yang bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa atas kegiatan mengajar yang dilakukan. Data yang diperoleh dari tes tersebut menjadi bahan evaluasi pembelajaran Kemenkeu Mengajar di tahun mendatang sehingga diharapkan kegiatan Kemenkeu Mengajar terus menerus melakukan perbaikan dan penyempurnaan demi tercapainya tujuan kegiatan yaitu mencerdaskan bibit-bibit unggul bangsa di bidang keuangan.



Teks: Mega





Memahami Prosedur

Pencegahan, Penyanderaan, dan Penagihan Pajak

Ilustrasi:

Direktur PT XYZ dengan inisial ABC disandera oleh Kanwil DJP Jakbar dan KPP Pratama Jakarta 12345 karena tunggakan pajak sebesar Rp6.038.954.010,- (enam miliar rupiah). ABC diketahui sebagai orang yang bertanggung jawab atas utang pajak tersebut.

Saat proses penagihan, DJP telah melakukan sesuai langkah – langkah yang berlaku. DJP telah memberikan imbauan, pemanggilan, menerbitkan surat paksa, memblokir atau menyita aset, dan mencegah ABC bepergian ke luar negeri, namun ABC tetap tidak melunasi utang pajaknya. Sehingga langkah selanjutnya untuk melakukan tindakan penyanderaan adalah hal yang tepat.

Kronologinya, ABC dijemput di kediamannya di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Dibacakan Surat Perintah Penyanderaan (Sprindera) lalu dibawa ke Lapas Kelas IIA Salemba (tempat penitipan), setelah itu dilakukan pemeriksaan kesehatan, lalu ABC diserahkan ke pihak lapas.

Berdasarkan contoh ilustrasi diatas, kita dapat menilik adanya tindakan penyanderaan yang terkait

dengan ketidakpatuhan wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya. Dalam hal ini, ABC berhak untuk disandera, karena ia menjadi penanggung jawab atas utang pajak sebesar Rp6.038.954.010,- tersebut. DJP juga telah melakukan prosedur yang harus dilakukan sebelum melakukan penyanderaan terhadap ABC, namun ia tidak membayar utang pajak tersebut. Ia juga memenuhi kriteria penanggung pajak yang akan disandera :

1. **Mempunyai utang pajak paling sedikit Rp100.000.000,-;**
2. **Diragukan itikad baiknya. Adapun yang dimaksud dengan diragukan itikad baiknya adalah memenuhi unsur sebagai berikut:**
 - a. Penanggung pajak tidak merespon himbauan yang diberikan;
 - b. Penanggung pajak tidak bersedia melunasi utang pajak;
 - c. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama – lamanya atau berniat untuk itu;
 - d. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimilikinya dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya;
 - e. Penanggung pajak membubarkan badan usahanya atau menggabungkan atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan Perusahaan yang dimilikinya atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
3. **Telah mendapat izin dari Menteri Keuangan untuk melakukan penyanderaan terhadap ABC.**

Dengan memenuhi kriteria tersebut, ABC berhak untuk disandera. Seperti yang kita ketahui bahwa Rp6.038.954.010,- bukanlah jumlah yang sedikit. Lalu, mengapa tidak melakukan upaya keberatan, banding, dan gugatan apabila jumlah tersebut merupakan jumlah yang tidak memungkinkan untuk dibayar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020, Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.

Pasal 58 ayat (1) PMK Nomor 189/PMK.03/2020 menyatakan bahwa tindakan penyanderaan dilakukan terhadap penanggung pajak jika utang pajaknya paling sedikit Rp,100.000.000- dan diragukan itikad baiknya.

Jangka waktu penyanderaan adalah enam bulan dan bisa diperpanjang paling lama enam bulan. Penyanderaan ABC bisa dihentikan ketika utang pajak dan biaya penagihan pajak dibayar lunas atau jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah habis, atau berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan.

Bahwa dari penjelasan tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa tindakan penyanderaan yang dilakukan terhadap kasus di atas adalah tindakan yang tepat, karena bagaimanapun membayar pajak adalah hal wajib dan memaksa. Ditambah dengan sebelum melakukan penyanderaan, DJP telah melakukan prosedur yang harus dilakukan sebelum melakukan penyanderaan dan jika pihak tersebut keberatan, mengapa PT XYZ tidak melakukan keberatan, banding, dan gugatan selama waktu yang telah ditentukan.

Teks: Tirta



Apa Kabar Kesehatan Mental, Wahai Pekerja?

Yuk Jaga Kesehatan Mental Kita

“Menurut Indonesia National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) tahun 2022, satu dari tiga remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental, sementara satu dari dua puluh remaja Indonesia memiliki gangguan mental dalam 12 bulan terakhir”, sebuah data pembuka yang disampaikan oleh Dra. Retno D. Purba, M.PsiT, Psikolog pada kegiatan webinar bertajuk “Apa Kabar Kesehatan Mental, Wahai Pekerja?”.

Sebagai praktisi di bidang kesehatan mental, beliau dihadirkan pada kegiatan Open Class yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Kepemimpinan, untuk memberikan pandangan khusus terkait aspek kesehatan mental para pekerja di tahun 2023. Kali ini akan kami ulas pembahasan pada acara tersebut, selamat membaca!

Ibu Neno, begitu beliau disapa, menyampaikan bahwa dalam satu dekade terakhir, kesadaran masyarakat terhadap isu kesehatan mental meningkat dengan sangat signifikan. Oleh karenanya, dari beberapa survei dan penelitian di Indonesia, terjadi peningkatan kasus terkait kesehatan mental seperti yang disebutkan di awal. Meningkatnya isu terkait kesehatan mental ini tentunya adalah sebuah kelegaan, sebab masyarakat bisa turut berperan dalam penanganan awal masalah-masalah kejiwaan

di sekitarnya. Namun, di saat yang bersamaan terjadi pula beberapa hal yang sangat meresahkan, salah satunya fenomena *self diagnose* yang berbabahaya bagi penanganan kasus kesehatan mental.

Hal pertama yang harus menjadi pemahaman umum terkait kesehatan mental adalah definisi sehat mental itu sendiri. Menurut World Health Organization (WHO) sehat mental adalah situasi di mana seseorang dapat merasa sejahtera, mampu mengelola permasalahan yang mengakibatkan stres, menyadari kapasitas diri, dapat belajar dan bekerja dengan baik, serta berkontribusi pada sosial dan komunitas. Secara ringkas, aspek dalam sehat mental meliputi cara seseorang mengelola emosi, pikiran, dan perilakunya, termasuk keberfungsian secara sosial (psikososial), seperti bekerja dan menjadi bagian dari komunitas.

Ibu Neno melanjutkan paparannya tentang langkah berikutnya dalam memahami kesehatan mental, yaitu perspektif dalam memandang kesehatan mental yang memiliki derajat dan tingkatan tertentu. Secara umum, terdapat 4 kuadran yang menggambarkan kondisi kesehatan mental individu, yaitu sehat, sehat bermasalah, orang dengan masalah kejiwaan, dan yang terakhir, orang dengan gangguan kejiwaan. Dilihat sebagai *continuum*, yang artinya dapat dialami berbeda antara individu, sehingga penanganan yang diberikan berbeda pula.

Dalam menangani masalah terkait kesehatan mental, terdapat 3 langkah penanganan, yaitu kenali, validasi, dan regulasi. Pada tahap kenali, beberapa indikasi penting yang harus diwaspadai antara lain, gangguan tidur, perasaan tertekan, kurang percaya diri, dan gangguan dalam memutuskan sesuatu. Dalam mengenali dan mengidentifikasi perasaan tertentu, dapat menggunakan diagram Roda Perasaan Gloria Wilcox. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi generalisasi dalam memahami perasaan dan mampu mengenai derajat pada perasaan tersebut. Salah satu metode umum yang digunakan dalam mengidentifikasi permasalahan pada kesehatan mental adalah *General Health Questionnaire* (GHQ), yang dalam prosesnya, harus diampu dan melalui tenaga kesehatan di bidang kesehatan mental, bukan untuk digunakan secara umum oleh masyarakat awam.

Berdasarkan data WHO, pada tahun 2019, sebanyak 15% dari jumlah sampel di umur produktif, memiliki masalah kesehatan mental. Masalah kesehatan mental yang umum dialami oleh pekerja antara lain depresi, cemas, *burn-out*, dan masalah fisik seperti gangguan tidur dan pola makan yang keseluruhan indikasi ini akan bermuara pada aspek keberfungsian sebagai pekerja. Dalam menjaga kesehatan mental pekerja, terutama secara preventif-promotif, dapat dilakukan upaya untuk memberikan pemahaman kepada pekerja dan organisasi mengenai cara-cara untuk mengurangi risiko masalah kesehatan mental, meningkatkan literasi mengenai kesehatan

mental, sehingga diharapkan dapat mengurangi stigma tentang kesehatan mental dan komunikasi yang terbuka dan suportif dalam lingkup ruang kerja.

Pada upaya menjaga kesehatan mental pekerja secara kuratif-rehabilitatif, direkomendasikan untuk dilakukan penanganan secara individual maupun kelompok. Penanganan secara individual ditujukan untuk membantu pekerja meningkatkan kemampuan mengelola stres dan menanggulangi keluhan psikologis dan meningkatkan resiliensi dalam bekerja. Ada pun penanganan kelompok ditujukan untuk membantu pekerja dan organisasi memiliki dukungan secara psikososial, baik dalam bentuk dukungan kelompok (*support group*) ataupun komunikasi yang terbuka dalam *buddy system*. Dalam praktiknya, *buddy system* ini dapat juga disebut program Dukungan Psikologi Awal (DPA) yang dapat diperankan oleh para rekan kerja. Program DPA ini bertujuan agar tercipta lingkungan kerja yang dapat saling menemani dan saling mendukung antar pekerja, sehingga risiko terjadinya masalah kesehatan mental pekerja dapat dimitigasi.

Secara organisasi, intervensi yang dapat dilakukan pada aspek kesehatan mental pekerja adalah pembentukan budaya kerja yang suportif, layanan EFAP (*Employee & Family Assistance Program*), dan integrasi konsep *Work-Life-Balance* dalam regulasi dan praktik bekerja sehari-hari. Bersama dengan penanganan secara individu, intervensi organisasi pada kesehatan mental pekerja saat ini sudah menjadi keharusan yang akan membentuk penanganan terkait kesehatan mental pekerja secara komprehensif dan bersifat promotif-preventif. Peran aktif dari berbagai pihak, tentunya menjadikan isu permasalahan seputar kesehatan mental pekerja dapat ditangani dengan lebih baik.

Teks: Heru



IKH Online

Inovasi teknologi Set. PP memang tidak ada habisnya. Setelah bulan Juli 2023 lalu meluncurkan e-Tax Court, pada 2024 ini Set. PP kembali meluncurkan transformasi digital berupa Aplikasi IKH-Online atau Izin Kuasa Hukum Online. Apa saja yang menjadi titik utama aplikasi ini? Mari kita simak bersama.

Digital

Aplikasi ini merupakan salah satu Langkah transformasi digital yang dilakukan oleh Set. PP. Seluruh dokumen mulai dari permohonan IKH, e-materai, hingga kartu IKH akan diproses secara digital.

Jaminan Waktu

Dengan implementasi Aplikasi IKH-Online, terdapat batasan-batasan waktu yang lebih jelas dan lebih cepat. Permasalahan pengajuan IKH baik permohonan baru maupun perpanjangan saat ini adalah para stakeholder sulit untuk mendapatkan status pengajuannya. Hal tersebut yang akan diselesaikan pada aplikasi ini dengan status yang *real-time* dan transparan.

Praktis

Tentu saja dengan digitalisasi, proses akan lebih praktis karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Para pemangku kepentingan juga tidak perlu takut kehilangan dokumen termasuk Kartu IKH karena akan disimpan di dalam aplikasi.

Inovasi ini disambut dengan cukup baik oleh para stakeholders, dalam hal ini para Kuasa Wajib Pajak. Terbukti sampai dengan akhir bulan April, selang beberapa hari sejak diluncurkannya aplikasi IKH Online, lebih dari 30 (tiga puluh) permohonan IKH baru telah diterima dan diproses menggunakan aplikasi ini. Dengan adanya aplikasi ini, selain menawarkan percepatan proses bisnis pembuatan IKH menjadi 8 (delapan) hari kerja, Set.PP juga turut mendukung budaya paperless dalam proses pembuatan IKH bagi para Kuasa Wajib Pajak. Kedepannya, IKH Online akan terus dikembangkan demi seluas-luasnya kebermanfaatan bagi para pemangku kepentingan di lingkungan Sekretariat Pengadilan Pajak. IKH Online, #NyataMudahnya.

Teks: ADP dan Audrey

It's TACO Time!

RESOLUSI BARU



Gak berasa
sudah berganti tahun..
Sudah saatnya
buka halaman baru..

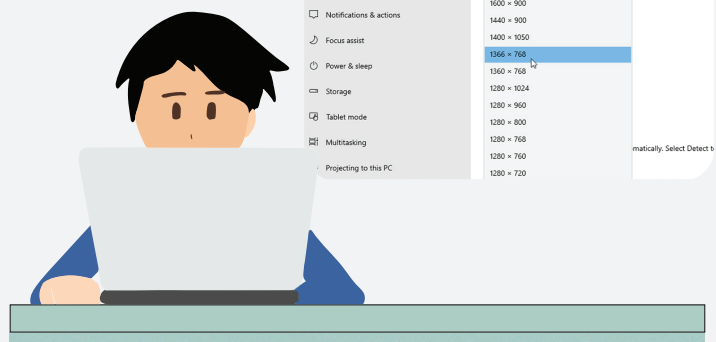
Bagaimana kalau kita
awali dengan menyiapkan
resolusi baru?



Wah ide bagus,
mari kita siapkan!



Ok, enaknya ganti
Full HD aja di 1920*1080



@ridwan firmansyah



PENGADILAN PAJAK
REPUBLIK INDONESIA



SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
SEKRETARAT JENDERAL

IMPACT
Integrity modern professional adaptive collaborative transformative



e-TAX COURT
modern dan praktis



lebih cepat dan **lebih mudah**
mengajukan permohonan atau
perpanjangan Izin Kuasa Hukum
via **IKH Online**

Nyata Mudahnya

setpp.kemenkeu.go.id